

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten ponorogo merupakan kabupaten yang memiliki kebudayaan yang sangat tinggi, mulai dari sejarah budayanya sampai sejarah terbentuknya kabupaten ponorogo. Pusat pemerintahan kabupaten ponorogo hampir sama dengan Keraton mataram (sekarang menjadi Yogyakarta dan Surakarta) yaitu didepanya terdapat lapangan besar yang fungsinya kalau pada waktu jaman Keraton Mataram sebagai penyelenggaraan sayembara, penyampaian titah raja pada rakyatnya, pusat perdagangan rakyat dan juga hiburan.

Alun – alun ponorogo pada saat ini menjadi tempat masyarakat mencari nafkah mulai dari jual – beli kebutuhan hidup manusia, mulai dari kebutuhan baju sampai makanan, pelayanan jasa dan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Alun – alun ponorogo sendiri memiliki keindahan yang menurut saya menjadi keindahan yang ciri khas yaitu sebelah selatan terdapat panggung yang sangat megah yang biasanya digunakan untuk tampilnya reog ponorogo maupun acara lainnya. Dipanggung utama itu terdapat beberapa patung yang gunannya untuk memperindah panggung. Disamping kanan dan kiri panggung terdapat beberapa patung singa yang menjadikan alun - alun ponorogo semakin sakral. Kemudian dibagian utara terdapat bangunan sinom yang disebut paseban.

Paseban kalau jaman dahulu sebagai tempat menghadap Raja, pejabat, tapi pada saat ini paseban alun – alun ponorogo digunakan untuk insepktur upacara dan pejabat pemerintah pada saat ada acara yang sifatnya kenegaraan dan sebagai tempat istirahat masyarakat yang berkunjung ke alun – alun ponorogo. Keindahan itu akan berkurang ketika kita pergi kesana ada beberapa ketidaknyamanan yang disebabkan dengan banyaknya pengamen- pengamen liar, baik pengamen yang tua – tua, anak – anak, maupun pengamen yang masih muda. Karena kalau banyak pengamen akan mengurangi kenyamanan kita apa waktu dialun - alun, misalnya ketika kita lagi bersantai dengan keluarga kemudian datang pengamen maka akan mengurangi rasa nyaman dalam hati kita. Apalagi menjelang hari jadi kabupaten ponorogo bulan depan pastinya Alun – alun ponorogo akan dipadati dari semua

penjuru masyarakat mulai dari masyarakat desa maupun kota sendiri, karena pada waktu hari jadi kabupaten ponorogo sendiri akan banyak agenda – agenda yang akan dilaksanakan.(www.sejarah.alun-alun.kotareog.com)

Salah satu permasalahan sosial yang ada di Indonesia yaitu semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di negara ini. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah pengemis atau pengamen jalanan. Sebenarnya kalau sesuai pasal 34 ayat 1 undang – undang dasar 1945 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" kalau pasal ini sudah diterapkan oleh pemerintah sebenarnya di Indonesia ini ataupun di Ponorogo ini sudah bebas pengamen. Selain dari orang yang malas bekerja sebenarnya pengamen juga berasal dari masyarakat atau anak – anak yang terlantar misalnya anak – anak pinggir kota yang serba kesusahan atau anak – anak yang putus sekolah dengan berbagai alasan. Kalau pengamen yang ada di alun – alun Ponorogo sebagian besar orang yang asli Ponorogo, orang yang putus sekolah atau mereka yang bertempat tinggal dipinggir kota Ponorogo.

Pengamen di alun – alun Ponorogo bukan saja dilakukan oleh perorangan akan tetapi dilakukan dengan berkelompok, atau biasanya sudah punya group masing – masing. Ada pengamen yang sopan ada juga pengamen yang bikin masyarakat pengunjung alun – alun jadi terganggu. Pengunjung terganggu dikarenakan ulah dan sikap para pengamen tersebut, karena mereka para pengamen yang ada di alun – alun Ponorogo tidak hanya satu orang atau satu group melainkan banyak orang dan group. Jadi ketika ada pengunjung yang sedang menikmati alun – alun kabupaten Ponorogo tidak lama juga datang para pengamen yang menawarkan jasa hiburannya yaitu menyanyi. Kemudian setelah menyanyi para pengamen langsung minta upah uang, namun disini yang bikin kesel pengunjung yaitu para pengamen seolah – olah menarget uang yang diminta dari pengunjung, biasanya kalau hanya dikasih lima ratus rupiah mereka tidak mau bahkan tidak segan – segan para pengamen mengeluarkan kata – kata yang kotor ke pada para pengunjung atau yang dimintai uang.

Namun untuk mengantisipasi banyaknya pengamen di alun – alun Ponorogo sudah ada tugas sendiri dari satuan polisi pamong praja, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk

menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Maka berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengamen Di Alun – Alun Kabupaten Ponorogo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah di definisikan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah mengetahui *Bagaimana* Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengamen Di Alun – Alun Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui “Bagaimana Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengamen Di Alun – Alun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Satpol PP kabupten Ponorogo sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk menanggulangi pengamen di Alun - alun Kabupaten Ponorogo
2. Bagi penulis untuk mengaplikasikan teori – teori ke lapangan yang dulunya teori – teori itu sudah didapat diruangan kuliah.

E. Penegasan Istilah

1. Pengertian Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mencari jalan keluar dalam sebuah masalah. Disini peneliti ingin membahas tentang upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Dalam Menegakkan Perda Kabupaten

Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Yang dimana saat ini masih banyak pengamen yang berda dialun – alun Kabupaten Ponorogo.

2. Satpol PP menurut Peraturan Pemerintah no. 6 Tahun 2010 yaitu aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda, menjaga keamanan dan ketentraman dilingkungan Pemerintahan Daerah. Sehingga apa yang dipunyai oleh Pemerintah Daerah bisa aman dan apapun fasilitas Pemerintah Daerah yang dinikmati masyarakat bisa nyaman dan aman, termasuk ketika masyarakat menikmati alun – alun bisa nyaman dan bebas dari gangguan pengamen.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat merupakan dasar aturan yang ada di Kabupaten Ponorogo tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sedangkan pengertian Peraturan Daerah atau Perda Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 sebagai berikut peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama Kepala Daerah.
4. Pengamen adalah penari atau penyanyi yang berpindah – pindah dalam mengadakan pertunjukannya.

F. Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian landasan teori sangat penting, karena bisa menjadi dasar dalam penelitian sekaligus untuk memecahkan permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam obyek penelitian. Maka dari itu untuk penelitian ini, peneliti mengambil teori sebagai berikut :

- a. Pengertian Ketertiban Umum Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
- b. Sesuai Pasal 3 yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak – hak warga dan masyarakat;
 - b. menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
 - c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Sedangkan yang terkandung dalam bab VII pasal 21 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban terhadap :
- a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal ditempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
 - b. anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
 - c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
 - d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila

G. Definisi Operasional

Untuk meniai bagaimana Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengamen Di Alun – Alun Kabupaten Ponorogo (Studi Tentang Menegakkan Perda Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011)

dengan fokus penelitian diatas maka :

- a. Untuk menilai apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo benar – benar Menegakkan Perda Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, maka diukur dari :

1. Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo selama satu tahun atau selama satu masa anggaran.
 2. Kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan suatu pekerjaan atau tanggungjawab.
- b. Untuk menilai bagaimana proses pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dalam hal penertiban pengamen dialun – alun Kabupaten Ponorogo dapat diukur dari :
1. Metode dalam hal melakukan penertiban terhadap pengamen.
 2. Melalui cara – cara apa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo menertibkan pengamen yang berada dialun – alun.
- c. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dalam hal penertibban Pengamen yang berada dialun – alun Kabupaten Ponorogo dapat diukur dengan :
1. Tidak berjalanya kegiatan – kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dalam hal penertiban.
 2. Anggaran Biaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
- d. Untuk mengetahui Upaya – upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat , dapat diukur dari :
1. Kordinasi antara pimpinana dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
 2. Kordinasi antara Satuan Polisi Pomong Praja, Para Pedagang Kaki lima dan Pengamen.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian sangatlah penting dalam penelitian ilmiah supaya hasil penelitiannya bisa tersusun dengan sistematis dan benar. Metode yang di ambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut creswell (1998) yang di kutip dalam buku Noor Juiansyah menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami dengan jenis penelitian deskriptif,

yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. (Juliansyah, 2011:34).

Sedangkan menurut Kirk dan Miller (1968) yang dikutip di dalam buku A. Fatchan mengatakan bahwa penelitian kualitatif bermula dari suatu pengamatan yang bersifat kualitatif yang mencatat segala gejala yang terjadi dalam alam dan kehidupan manusia secara alamiah. Penelitian ini dicatat dengan menggunakan uraian kata-kata dalam suatu kalimat tertentu dan tidak menggunakan gradasi atau tingkatan angka. (Fatchan, 2011:11).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendiskripsikan suatu gejala atau gambaran yang kompleks yang terjadi saat ini. Sumber dari penelitian ini adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian dan data dari penelitian ini dari berbagai sumber yang sesuai dengan tema penelitian. Maka dalam penelitian ini berusaha untuk menyajikan deskripsi mengenai Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengamen Di Alun – Alun Kabupaten Ponorogo (Studi Tentang Menegakkan Perda Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terhadap hal-hal yang diteliti. (Fatchan, 2011:68). Informan ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi atau kondisi sosial yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Selain itu, menurut Spradley (1980) yang dikutip pada buku Moeleng J, kriteria informan adalah sebagai berikut :

Informan yang bisa memberikan informasi mengenai objek yang diteliti, informan seyogyanya harus memiliki beberapa kriteria, diantaranya :

1. Cukup lama dan intensif dengan informasi yang akan mereka berikan.
2. Masih terlibat penuh dengan kegiatan yang diinformasikan.
3. Mempunyai banyak waktu untuk memberikan informasi.
4. Tidak mengkondisionalkan atau merekayasa informasi yang akan di berikan.
5. Siap memberikan informasi dengan ragam pengalamannya.

Dalam penelitian kualitatif, biasanya peneliti memiliki jumlah subyek (informan) yang terbatas. Dengan jumlah yang terbatas itu, peneliti akan bertanya kepada subyek yang dijumpai di lokasi penelitian, maka dari itu untuk penelitian ini untuk menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik, *Convenience Sampling* atau *Accidental Sampling* yaitu Sampel yang terdiri dari unit atau individu yang mudah ditemui, dalam hal ini peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Misalnya seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Dengan kata lain siapa saja yang kebetulan ketemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel dan sampelnya diambil secara acak (*random*). (Noor Juliansyah, 2011 : 155)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal penelitian data sangatlah penting, supaya hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. (idrus, 2009 : 61)

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini adalah

1. Interview / wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, dan perasaan yang dilakukan dua pihak yaitu

pewawancara(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). (Bungin, 2003 : 108)

2. Dokumentasi

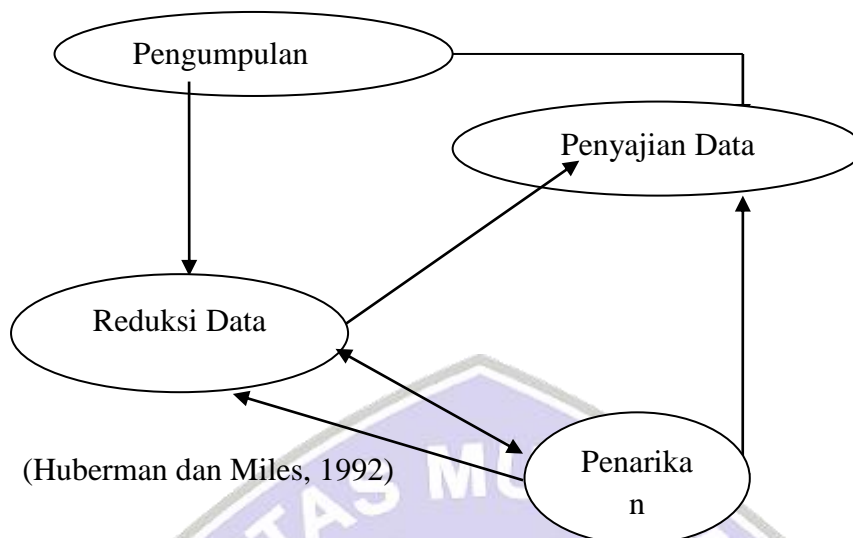
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh orang lain. Dokumentasi dapat dilakukan untuk menyimpan hasil penelitian dan mendapatkan gambaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan foto, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi tentang penelitian terkait yang berhubungan dengan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data di lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami. (Bungin, 2003:194).

Dari hasil penelitian yang telah di simpulkan secara deskriptif kualitatif, sehingga dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan akurat tentang permasalahan yang telah di angkat dan dirumuskan. Dalam model analisis data Huberman dan Miles mengajukan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pembentukan yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut. (Idrus, 2009:148).

Dari beberapa analisis tersebut, maka secara ringkas proses itu dapat digambarkan sebagai berikut (Huberman dan Miles, 1992)NBMN

Gambar 1.1**Skema Analisis Data Penelitian**

Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak diantara kegiatan reduks, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah siap dikerjakan.

Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas.

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. (Idrus, 2009:148)

2. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. (Idrus, 2009:150)

3. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh miles dan huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Idrus, 2009:151)

4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Babarapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat). (Idrus, 2009:151)

Dari pengertian di atas dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif

yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan.

